

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan dan berwenang menegakkan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU no. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, dan memberantas Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Agung RI sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Tugas utama Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 pasal 30, tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah :

1. Melakukan penuntutan;

2.Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.;

4.Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

5.Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pemeriksaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan wadah untuk menyalurkan keluhan yang di ajukan oleh masyarakat umum. Selanjutnya aduan tersebut akan di proses oleh kejaksaan untuk selanjutnya akan diteruskan atau tidak diteruskan tergantung kepada terpenuhinya aduan tersebut untuk bisa dikatakan sebagai perkara. Jika sudah dapat dikatakan sebagai perkara maka akan di tindak lanjuti berdasarkan kriteria perkara tersebut yaitu Bidang Tindak Pidana Umum atau Bidang Tindak Pidana Khusus.

Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) merupakan aplikasi utama dari sistem Simkari, yang dikategorikan kedalam :

- a. Aplikasi khusus, terdiri dari modul manajemen perkara ( Pidum, Pidsus, Datun dan Yustisi)
- b. Aplikasi umum yaitu moduk kepegawaian, pengawasan (supervise), keuangan dan asset, pendidikan, perpustakaan dan modul EIS (laporan bulanan).

SIMKARI tentunya menjadi solusi dari semua permasalahan yang ada, bertujuan untuk mengelola seluruh data dan Informasi Kejaksaan Republik Indonesia yang setiap saat dapat disajikan secara cepat, lengkap dan akurat.

Dalam hal ini, untuk mempermudah mengelola data kepegawaian maka Kejaksaan Republik Indonesia, baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri telah menggunakan aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI* (SIMKARI). Kepegawaian berfungsi untuk merekam atau mengentri data terkait data/informasi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Tetapi, tidak semua data diolah oleh sistem Aplikasi Simkari, sesuai perosedur, pemutakhiran data hanya dikelola oleh Biro Kepegawaian, sedangkan untuk satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diperkenankan memutakhirkan data pegawai untuk Gol dan Kepangkatan, Kenaikan Gaji Berkala semua pegawai, DP3 dan SKP.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam tentang **“Penerapan Aplikasi Simkari dalam Manajemen Kepegawaian pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul tugas akhir ini maka masalah yang akan penulis rumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan aplikasi SIMKARI dalam Manajemen Kepegawaian pada Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam penggunaan aplikasi SIMKARI pada Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan aplikasi SIMKARI dalam Manajemen Kepegawaian pada Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penggunaan aplikasi SIMKARI pada Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat

### 1.4 Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Kec. Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat. Selama 40 hari kerja.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, artikel yang sudah diterbitkan dan dokumen-dokumen perusahaan dan data primer pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan beberapa staf yang dianggap dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan secara akurat.

## **Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penelitian laporan ini dikelompokkan atas :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan kegiatan magang, tempat dan waktu magang, kegiatan dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Merupakan bab yang berisikan tinjauan teoritis yang memuat teori teori yang didapatkan semasa kuliah dan buku-buku pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang diangkat penulis.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR KEJAKSAAN TINGGI SUMATRA BARAT**

Membahas tentang gambaran umum dari lembaga kegiatan magang yaitu pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, yang berisikan tentang sejarah lembaga, visi dan misi lembaga, tugas dan fungsi lembaga, struktur organisasi lembaga, dan uraian tugas unit kerja.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisikan pembahasan tentang Penerapan Aplikasi SIMKARI dalam Manajemen Kepegawaian, serta kendala dan solusi dalam penggunaan aplikasi SIMKARI pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil magang dan saran dari penulis untuk lembaga dan penelitian lainnya yang didasarkan pada data penelitian.